

RINGKASAN

ANJENG KINANTAN, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jenderal Soedirman, Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021). Komisi Pembimbing: Ketua Dr. Setya Wahyudi, S.H., M. H. dan Anggota Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, namun pada kenyataannya terdapat Notaris yang melakukan tindak pidana dengan cara memalsukan akta otentik. Hal ini terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 menyatakan bahwa Notaris terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan Pasal 378 KUHP dan menimbulkan kerugian sehingga perlu perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan, namun dalam hal memalsukan akta otentik Notaris juga dapat dipidana dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP atau Pasal 264 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris pada putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penyajian data dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Metode analisis data secara normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Notaris pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/Pid/2021 kurang tepat karena, dakwaan yang digunakan dalam putusan ini yaitu dakwaan alternatif sehingga Hakim dalam memutus perkara atas perbuatan Notaris seharusnya memilih tindak pidana pemalsuan bukan tindak pidana penipuan. Kedua, Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris adalah perlindungan hukum represif yang dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan yang tergugatnya adalah Notaris dengan menuntut kerugian yang dialaminya, selain itu Notaris juga dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 UUJN.

Kata kunci: tindak pidana penipuan, notaris, perlindungan hukum.

SUMMARY

ANJENG KINANTAN, *Notary Masters Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Criminal Acts Of Fraud By Notary and Legal Protection For Aggrieved Parties (Study of Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021/), Supervisory Commission: Chair Prof. Dr. Setya Wahyudi, S.H., M. H. and Member Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H.*

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds however, in reality there are Notaries who commit criminal acts by falsifying authentic deeds. This can be seen in the Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021 stating that the Notary was proven to have committed a criminal act of fraud under Article 378 of the criminal code and cause losses so that legal protection is needed for the injured party however, in this case of falsifying an authentic notary deed, can also be punished under Article 263 paragraph (1) or Article 264 of the criminal code. This research aims to analyze the implementation of criminal acts of fraud committed by Notary in the Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021 and analyze legal protection for parties who suffer losses as a result of criminal acts committed by Notary.

This research is normative legal research with statutory, conceptual and case approaches. The data source used is secondary data. Data collection was carried out through literature study. Presentation of data in the form of systematically arranged descriptions. The data analysis method is normatively qualitative.

The results of the research show that: First, The implementation of criminal acts of fraud committed by Notary in Supreme Court Decision Number 379 K/Pid/2021 is not right because The charges used in this decision is alternative charges so that the judge in deciding the case regarding the Notary's actions should choose the crime of forgery rather than the crime of fraud. Second, Legal protection for parties who suffer losses as a result of criminal acts committed by a Notary is repressive legal protection is carried out by filing a lawsuit in court where the defendant is a Notary to sue for the losses they have experienced, apart from that the Notary can also be reported to the Regional Supervisory Council based on the provisions regulated in Article 70 UUJN.

Keywords : criminal act of fraud, notary, legal protection.